



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
{LPPD}**

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah laporan keterangan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sebagai Organisasi Perangkat Kerja Daerah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai bahan pertanggung jawaban pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Laporan ini disusun dengan mengacu kepada Pedoman Pe

nyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagai salah satu komponen laporan pertanggungjawaban yang diharapkan dapat menggambarkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan yang diberikan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar selama Tahun Anggaran 2022.

Diharapkan agar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi salah satu dokumen acuan bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam merencanakan dan melaksanakan Pembangunan.

Benteng, Januari 2023

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR,**

DR. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si.

Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19840104 200903 2 003

KATA PENGANTAR

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah laporan keterangan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sebagai Organisasi Perangkat Kerja Daerah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai bahan pertanggung jawaban pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Laporan ini disusun dengan mengacu kepada Pedoman Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagai salah satu komponen laporan pertanggungjawaban yang diharapkan dapat menggambarkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan yang diberikan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar selama Tahun Anggaran 2022.

Diharapkan agar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi salah satu dokumen acuan bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam merencanakan dan melaksanakan Pembangunan.

Benteng, Januari 2023

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR,**

DR. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si.

Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19840104 200903 2 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum OPD	1
1.2 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi OPD ...	8
1.3 Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.....	10
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN	
PEMERINTAHAN.....	12
2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	
2.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	12
2.1.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama.....	22
2.1.3. Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan.....	23
2.1.4. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja.....	23
2.1.5. Inovasi.....	24
2.1.6. Prestasi/Penghargaan.....	24
2.2. Kebijakan Daerah (Perda, Perbup dan Keputusan Bupati) Yang Diinisiasi oleh Perangkat Daerah dan Ditetapkan Oleh Kepala Daerah.....	25
2.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2022.....	26
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS	
PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....	27
BAB IV PENUTUP	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar (DPKP) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. DPKP sebagai lembaga teknis daerah dibentuk dengan tujuan menunjang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, yang meliputi :

- Sub Urusan Perumahan, kewenangan kabupaten/kota mencakup (1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota. (2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Sub Urusan Kawasan Permukiman, kewenangan kabupaten/kota mencakup Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha.
- Sub Urusan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), kewenangan kabupaten/kota mencakup penyelenggaraan PSU perumahan.
- Sub Urusan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, kewenangan kabupaten/kota mencakup sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil.

Permasalahan Strategis di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni di Kabupaten Kepulauan Selayar, Masih rendahnya kawasan kumuh yang tertata, berdasarkan telaahan terhadap Renstra yaitu belum optimalnya Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota, Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak, hal ini berkaitan dengan Visi : Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia pada Misi 1 Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan dan Misi 3 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan Program yang mendukung pencapaian kedua Misi tersebut yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- b. Program Pengembangan Perumahan;
- c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Program Kawasan Permukiman;
- e. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- f. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Terhadap Telaahan RTRW struktur ruang wilayah direncanakan pengembangannya dengan penataan pusat-pusat pemerintahan, pusat-pusat permukiman, pusat-pusat kegiatan industri, perdagangan barang dan jasa serta simpul transportasi yang ada di wilayah ini. Penatagunaan ruang yang berskala internal kabupaten/ kota diserahkan wewenang dan tanggung jawabnya kepada kabupaten/kota masing-masing, sehingga dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis yaitu :

- Perlunya pengoptimalan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat rumah layak huni di perumahan dan kawasan permukiman,

- Perlunya pengoptimalan pemenuhan Prasana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di perumahan dan kawasan permukiman,
- Adanya prioritas dan dukungan dalam penanganan kawasan permukiman secara terpadu.

Identifikasi permasalahan DPKP Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota :
 - Refomasi Biokrasi (RB) belum sepenuhnya berjalan efektif sehingga mendorong perbaikan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Nilai (Sakip) pada tahun 2021 yaitu C;
2. Program Kawasan Permukiman :
 - Kerjasama antar Perangkat Daerah terkait penanganan kawasan kumuh; dan
 - Perlu adanya revisi SK kawasan kumuh;
3. Program Pengembangan Perumahan :
 - Belum optimalnya sistem data dan informasi perumahan;
 - Keterbatasan akses pembiayaan rumah untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi Masyarakat Prasejahtera;
 - Masih adanya perumahan yang belum memiliki standar layak huni sesuai Keputusan Menteri Prasarana Wilayah Republik Indonesia Nomor 403 tahun 2002; dan
 - Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni di Kabupaten.
4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman :
 - Kerja sama antar Perangkat Daerah terkait tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha.
5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (Prioritas) :

- Belum optimalnya pemenuhan layanan PSU seperti pengelolaan jalan lingkungan, drainase lingkungan di kawasan permukiman.
6. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman :
- Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan kemampuan kecil belum berjalan.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terletak pada titik koordinat -5.90973,121.36036, yang beralamat di Jl. Kemiri No. 27 Telp. (0414) 21313 Benteng Kepulauan Selayar, Email : diperkimdpkp@gmail.com.



Visi dan Misi Kepala Daerah

Menelaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar dapat diuraikan sebagai berikut :

Visi

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Sehingga berdasarkan permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar yang berbasis pada sumberdaya maritim serta memperhatikan rumusan visi RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 dan RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar 2005-2025 dengan visi “Selayar sebagai Kabupaten Maritim Terdepan, Mapan, Mandiri, dan Berkelanjutan” maka Visi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk periode RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut :

“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”

Rumusan Pemaknaan Visi :

- **Bandar Maritim** adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa dan industri.
- **Kawasan Indonesia Timur** : Berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/ kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku dan Maluku Utara.

Indikator utama yang hendak diwujudkan pada akhir periode RPJMD dengan visi Bandar Maritim ini adalah: 1. Kepulauan Selayar berperan menjadi simpul transportasi laut nasional; 2. Pengelolaan sumberdaya alam yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin; 3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan serta menjadi penyedia komoditas ekspor perikanan dan non perikanan; 4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.

Bandar maritim didukung oleh 3 (tiga) pilar pembangunan, yaitu:

1. Kawasan Distribusi Logistik di Pammatata dan sekitarnya, ditopang oleh 5 (lima) sub-kawasan yakni:
 - a. Sub-kawasan utama pada Pelabuhan Benteng;
 - b. Sub-kawasan 2 (dua) pada kawasan pelabuhan Benteng-Jampea;
 - c. Sub-Kawasan 3 (tiga) pada Kawasan Pelabuhan Bonerate;
 - d. Sub-Kawasan 4 (empat) pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.
2. Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di Pasi - Gusung, didukung oleh tujuh sub-kawasan yakni:
 - a. Sub-Kawasan 1 pada Kawasan Matalalang;
 - b. Sub-Kawasan 2 pada Kawasan Baloiya;
 - c. Sub-Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Pinang;
 - d. Sub-Kawasan 4 pada Kawasan Pantai Bahuluang;
 - e. Sub-Kawasan 5 pada Kawasan Pantai Polassi;
 - f. Sub-Kawasan 6 pada Kawasan Pantai Kayuadi;
 - g. Sub-Kawasan 7 pada Kawasan Pantai Pulau Panjang.
3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, yang didukung oleh 5 (lima) sub-sentra:
 - a. Sub Sentra Utama pada Kawasan TPI Bonehalang;
 - b. Sub-Sentra 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi;
 - c. Sub-Sentra 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng-Jampea;

- d. Sub-Sentra 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate;
- e. Sub-Sentra 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

Misi

Misi merupakan gambaran upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. misi Kepulauan Selayar disusun untuk memperjelas langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan Kepulauan Selayar sebagai **Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia**. Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Kepulauan Selayar yang berbasis maritim meliputi :

1. Mengembangkan tatakelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan
2. Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
4. Mengembangkan pengelolaan potensi kelautan
5. Meningkatkan pembinaan kehidupan social dan keagamaan
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup

Dari keenam Misi Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut di atas, maka Misi Pertama, Kedua dan Ketiga yang terkait dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar. Misi Pertama, Kedua dan Ketiga tersebut dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan infrastruktur baik prasarana dan sarana yang berkualitas dan aksesibel serta merata dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar.

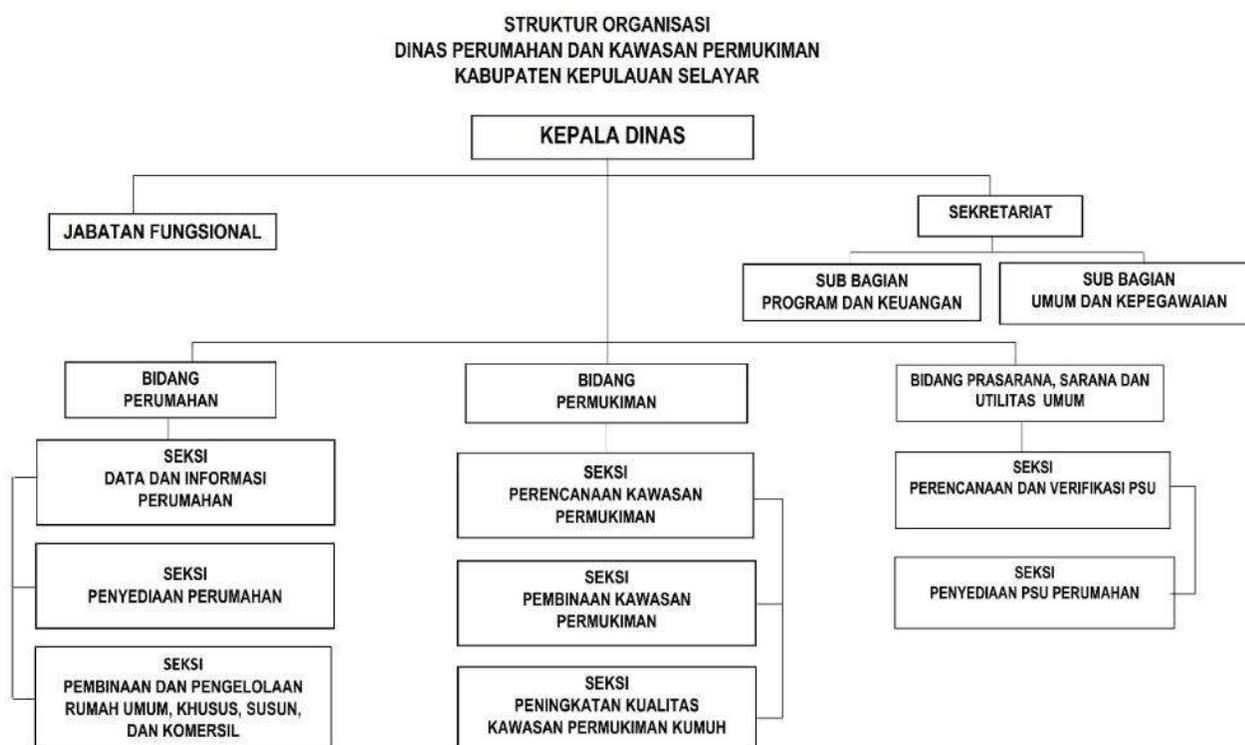
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pembangunan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman.

1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, meliputi :
 1. Subbagian Program dan Keuangan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Perumahan, meliputi :
 1. Seksi Data dan Informasi Perumahan
 2. Seksi Penyediaan Perumahan
 3. Seksi Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Umum, Khusus, Susun dan Komersil
- d. Bidang Permukiman, meliputi :
 1. Seksi Perencanaan Kawasan Permukiman
 2. Seksi Pembinaan Kawasan Permukiman
 3. Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh
- e. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, meliputi:
 1. Seksi Perencanaan dan Verifikasi PSU
 2. Seksi Penyediaan PSU Perumahan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, mempunyai tugas Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan, Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kawasan permukiman,

- b. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU),
- c. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang verifikasi dan sertifikasi,
- d. Pelaksanaan administrasi dinas, dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsi.

1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan data tahun 2022 sebanyak 30 orang. Berdasarkan Golongan jabatan pada satuan kerja ini lebih didominasi golongan III sebanyak 22 orang atau 73,33% dari total pegawai yang ada.

Sedangkan berdasarkan pendidikan terakhir lebih didominasi tingkat pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 23 orang atau dengan persentase 76,66%, setelah itu untuk tingkat pendidikan SMA berjumlah sebanyak 5 orang atau 16,67%, 1 orang untuk tingkat pendidikan Magister (S2), dan 1 orang untuk tingkat pendidikan Doktor (S3) artinya memiliki potensi yang cukup besar untuk pemanfaatan SDM dalam menjalankan tupoksi masing-masing.

Potensi SDM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.2.

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Golongan Jabatan
Berdasarkan Jenis Kelamin

Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	P	L	
I	0	0	0
II	3	2	5
III	10	12	22
IV	1	2	3
Total	14 orang	16 orang	30 orang

Sumber : Subbag Umum, Kepegawaian dan Hukum

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SD	-
SLTP	-
SMA	5 orang
Diploma	-
S1	23 orang
S2	1 orang
S3	1 orang
Total	30 orang

Sumber : Subbag Umum, Kepegawaian dan Hukum

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

1.2. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

2.1.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

DPKP sebagai lembaga teknis daerah dibentuk dengan tujuan menunjang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Rangkaian program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pada Tahun 2022 ini adalah bagian integral dalam mendukung pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan merupakan suatu perjanjian kinerja antara Kepala SKPD dengan Bupati Kepulauan Selayar. Pada Tahun 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp.21.118.256.493,- dengan rincian Belanja Operasi Rp.14.510.871.493,- dan Belanja Modal Rp.6.607.385.000,- selanjutnya melalui mekanisme perubahan APBD, anggaran keseluruhan berubah menjadi Rp.13.280.667.393,- dengan rincian Belanja Operasi Rp.8.934.626.023,- dan Belanja Modal Rp.4.346.041.370,-. Perubahan anggaran ini dilakukan dengan pertimbangan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan. Dari total anggaran sebesar Rp.13.280.667.393,- anggaran yang terbelanjakan sebesar Rp.12.330.318.549,- dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp.950.348.844,- dengan realisasi keuangan sebanyak 92,84%.

Program dan Kegiatan dilaksanakan setiap tahun dengan penekanan prioritas kinerja sesuai dengan kebutuhan anggaran yang telah direncanakan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 melaksanakan program dan kegiatan yang mengacu pada RKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2022. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan 6 Program dan 20 Kegiatan dengan 60 sub kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

URAIAN
PROGRAM
M/K
KEGIA
TAN

Progra
m
Pen
unj
ang
Uru
san
Pe
me
rint
aha
n
Dae
rah
Kab
upa
ten
/Ko
ta

Kegiatan :

n :

Perencanaan,

ana

an,

Pen

gan

gga

ran,

dan

Eva

lua

si

Kin

erja

Per

ang

kat

Dae

rah

Pe : |

|

K

:

|

K :

|

K

:

|

Kegiatan :

Administrasi

Keuangan

Perangkat

Daerah

Pe :

|

Pe :

|

K :

|

Pe :

|

Pe :

|

Kegiatan :

n :

Administrasi

Barang

Milik

Daerah

padat

Perangkat

Daerah

Perangkat

Daerah

Perangkat

Daerah

Perangkat

Daerah

Perangkat

Daerah

Perangkat

Pe :

|

Re :

|

Pe :

|

Kegiatan :

Admini

stra

si

Kep

ega

wai

an

Per

ang

kat

Dae

rah

Pe :

|

K

:

|

Pe :

|

Kegiatan :

Administrasi Umum Peringkat Daerah

Administrasi Umum Peringkat

Pe :

|

Pe :

|

Pe :

|

Pe !

|

Pe :

|

Pe :

|

Kegiatan :

n :
Pengad :
aan
Bar
ang
Mili |
k
Dae
rah
Pen
unj
ang
Uru
san
Pe
me
rint
ah
Dae
rah
Pe :

|

Kegiatan :

n :

Penyediaan

iaa

n

Jasa

a

Pen

unj

ang

Uru

san

Pe

me

rint

aha

n

Dae

rah

Pe :

|

Pe :

|

Kegiatan :

Pemeliharaan :

har :

har :

aan
Bar
ang
Mili
k |
Dae
rah
Pen
unj
ang
Uru
san
Pe
me
rint
aha
n
Dae
rah
Pe :

|

Pe (

|

Progra
m
Pen
ge
mb
ang
an
Per
um

aha
n

Kegiatan :

n :

Pendat

!

aan

Pen

yed

iaa

n

dan

!

Reh

abil

itas

i

Ru

ma

h

Kor
ban
Ben
can
a
ata
u
Rel
oka
si
Pro
gra
m
Kab
upa
ten
/Ko
ta
Id

:

|

Id :

|

Pe :

|

Pe :

|

Pe :

|

Pe : :

|

Kegiatan :

Sosialisasi

dan

dan

dan

dan

Per
sia
pan |
Pen
yed
iaa
n
dan
Reh
abil
itas
i
Ru
ma
h
Kor
ban
Ben
can
a
ata
u
Rel
oka
si
Pro
gra
m
Kab
upa

ten

/

Kot

a

So

|

|

Pe :

|

Re :

|

K

:

|

Kegiatan :

n :

Pemba

ngu

nan

dan

Reh

abil

itas

i

Ru

ma

h

Kor

ban

Ben

can

a

ata

u

Rel

oka

si

Pro

gra

m

Kab
upa
ten
/Ko
ta
Re

;

|

Pe | |

Kegiatan :

Pembinaan Pengelolaan Rumah Susah (|)

un

Um

um

dan

ata

u

Ru

ma

h

Khu

sus

Pe

|

|

Kegiatan :

**n :
Penerbitan
tan
izin
Permohonan
dan
Pembangunan
dan
Pembangunan**

Per
um
aha
n
Fa

| |

K | |

Kegiatan :

Penerbitan Serifikat Kepemilikan Ban

gun

an

Ge

dun

g

(SK

GB)

K

|

|

Progra
m
Ka
was
an
Per
mu
kim
an

Kegiata
n :
Penerbi
tan
Izin
Pe
mb

ang

una

n

dan

Pen

ge

mb

ang

an

Ka

was

an

Per

mu

kim

an

Pe

K : |

|

Kegiatan :

n :

Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan Kumuh dan Gangguan

dib

aw

ah

10

(Se

pul

uh)

Ha

Su

| |

Pe : .

|

Pe : |

|

K : |

|

Pe : |

|

Pe : .

|

Kegiatan :

n :

Peningkat

kat

an

Kualitas

lita

s

Kawasan

Perumahan

s

dibawah

aw

ah

10

(se

pul

uh)

Ha

Pe

|

|

Ke

|

K : |

|

Pe | |

Pe : |

|

Progra
m
Per
um
aha

n
dan
Ka
was
an
Per
mu
kim
an
Ku
mu
h

Kegiatan :

n :
Penceg
aha
n
Per
um
aha
n
dan
Ka
was

an
Per
mu
kim
an
Ku
mu
h
pad
a
Dae
rah
Kab
upa
ten
/Ko
ta
Pe

4 1

|

Progra
m
Pen
ing
kat
an
Pra
sar
ana
,
Sar
ana
dan
Util
itas
Um
um
(PS
U)

*Kegiata
n :*

Urusan :
Pen
yel
eng
gar
aan
PSU
Per |
um
aha
n

Pe : /

|

Pe : |

|

K : |

|

Progra
m
Pen
ing
kat
an
Pel
aya
nan
Ser
tifik
asi,
Kua
lifik
asi,
Kla
sifi
kasi
dan
regi
stra
si
Bid
ang
Per

um
aha
n
dan
Ka
was
an
Per
mu
kim
an
Kegiatan : !

Sertifik
asi
dan
Reg
istr
asi
Bag
i
Ora
ng
ata
u
Bad

an
Huk
um
yan
g
Mel
aks
ana
kan
Per
anc
ang
an
dan
Per
enc
ana
an
Ru
ma
h
Ser
ta
Per
enc
ana
an
Pra
sar
ana

,
Sar
ana
dan
Util
itas
Um
um
PSU
Tin
gka
t
Ke
ma
mp
uan
Kec
il
K

!

|

TOTAL

|

2.1.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI
------------	------------------	---------------	---------------	------------------

**KINERJA
UTAMA
(IKU)**

1.	Persentase penurunan luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha (%)	%	2,11	6,32%
2.	Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	%	3,72	3,26%
3.	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas	%	0,58	0,50%

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	REALISASI
	Umum) (%)			
4.	Persentase rekomend asi pengusula n sertifikasi, kualifikasi , klasifikasi dan registrasi pengemba ng yang diterbitka n (%)	%	100	-
5.	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperol eh rumah layak huni (%)	%	100	82,14%

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	REALISASI
6.	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerinta h Daerah Kabupate n yang memperol eh fasilitasi penyediaa n rumah yang layak huni (%)	%	100	-

2.1.3. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN URUSAN

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 tidak mengelola program dan kegiatan berdasarkan urusan.

**2.1.4. ANALISIS KESESUAIAN ANTARA KEGIATAN DENGAN
TARGET KINERJA PROGRAM YANG SUDAH DITETAPKAN
DALAM PERJANJIAN KINERJA**

Urusan Pemerintahan Daerah/Organisasi Tingkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan
2	3	4	5=4-3	$\frac{6-(4/3)*100}{0}$	7	8	9
Perumahan Kawasan Permukiman	Rp.13.280.667.393	Rp. 12.330.318.549	Rp. 950.348.844	92,84	6	100	20

2.1.5. INOVASI

NO.	URAIAN INOVASI	MAKSUD DAN TUJUAN INOVASI	HASIL/MANFAAT	KET.
1	2	3	4	5
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

2.1.6. PRESTASI/ PENGHARGAAN

Nama Penghargaan	Internasional	Tingkat			Diselenggarakan oleh/Penyelenggara	Ket.
		Nasional	Provinsi	Kabupaten		
2	3	4	5	6	7	8

Nama Penghargaan	Internasional	Tingkat			Diselenggarakan oleh/ Penyelenggara	Ket.
		Nasional	Provinsi	Kabupaten		
Piagam/Penghargaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan Penghargaan Kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Atas Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas Diberikan pada Rapat Gelar Pengawasan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022				√	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar	

2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN TAHUN 2022

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Ket.
		Nomor/Tanggal Pengesahan	Tentang		
1	2	3	4	5	6
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

3.1. Tugas Pembantuan dan Penugasan Yang Dilaksanakan (NIHIL)

3.2. Hambatan-Hambatan (NIHIL)

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak mengelola tugas pembantuan.

BAB IV PENUTUP

Secara umum, Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya pada bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat diselenggarakan dengan optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi tersebut juga sangat ditopang oleh kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

Capaian kinerja tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dijelaskan dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ini, sesungguhnya merupakan kinerja segenap komponen yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar, yang telah melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka mendukung Selayar sebagai Kabupaten Kepulauan Maritim yang sejahtera berbasis nilai keagamaan dan budaya.

Meskipun Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat diselenggarakan secara optimal berdasarkan indikasi pencapaian sasaran program dan kegiatan oleh segenap Instansi/Unit Kerja yang ada dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, namun disadari bahwa masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi keterbatasan, permasalahan dan hambatan yang melingkupi.

Dengan mengacu pada kondisi permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022, maka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun-tahun berikutnya akan terus dilakukan penyempurnaan dan perbaikan, khususnya dalam memenuhi harapan masyarakat.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 ini disusun sebagai suatu kewajiban konstitusional dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sekian dan Terima Kasih

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Benteng, Januari 2023

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR,**

DR. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si.

Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19840104 200903 2 003

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

2.1.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

DPKP sebagai lembaga teknis daerah dibentuk dengan tujuan menunjang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Rangkaian program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pada Tahun 2022 ini adalah bagian integral dalam mendukung pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan merupakan suatu perjanjian kinerja antara Kepala SKPD dengan Bupati Kepulauan Selayar. Pada Tahun 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp.21.118.256.493,- dengan rincian Belanja Operasi Rp.14.510.871.493,- dan Belanja Modal Rp.6.607.385.000,- selanjutnya melalui mekanisme perubahan APBD, anggaran keseluruhan berubah menjadi Rp.13.280.667.393,- dengan rincian Belanja Operasi Rp.8.934.626.023,- dan Belanja Modal Rp.4.346.041.370,-. Perubahan anggaran ini dilakukan dengan pertimbangan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan. Dari total anggaran sebesar Rp.13.280.667.393,- anggaran yang terbelanjakan sebesar Rp.12.330.318.549,- dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp.950.348.844,- dengan realisasi keuangan sebanyak 92,84%.

Program dan Kegiatan dilaksanakan setiap tahun dengan penekanan prioritas kinerja sesuai dengan kebutuhan anggaran yang telah direncanakan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	745,82%			
					Rp 3.064.518.423	Rp 3.028.293.628			
				<i>Kegiatan :</i>					
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	89,49%			
					Rp 47.119.000	Rp 41.194.000			
				- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Belanja Makan dan Minum tidak Terealisasi	Forum OPD tidak Terlaksana	
					Rp 16.000.000	Rp 12.195.000			
				- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			
					Rp 12.719.000	Rp 11.029.000			
				- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			
					Rp 8.600.000	Rp 8.190.000			
				- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan			
					Rp 9.800.000	Rp 9.780.000			
				<i>Kegiatan :</i>					
					100%	88,30%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2.283.999.000	Rp 2.261.318.509			
				- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	30 Orang			
					Rp 2.167.255.000	Rp 2.155.970.597			
				- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
					Rp 95.520.000	Rp 88.152.912			
				- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			
					Rp 14.224.000	Rp 11.885.000			
				- Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen			
					Rp 2.000.000	Rp 2.000.000			
				- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Laporan	12 Laporan			
					Rp 5.000.000	Rp 3.310.000			
				Kegiatan :					
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	74,50%			
					Rp 8.000.000	Rp 5.960.000			
				-	1 Laporan	1 Laporan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 3.000.000	Rp 1.900.000			
				- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan			
					Rp 3.000.000	Rp 2.100.000			
				- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan			
					Rp 2.000.000	Rp 1.960.000			
				Kegiatan :					
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	97,71%			
					Rp 14.000.000	Rp 13.680.000			
				- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Laporan	1 Laporan			
					Rp 2.000.000	Rp 1.770.000			
				- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	30 Orang	30 Orang			
					Rp 2.000.000	Rp 1.910.000			
				- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 Orang	10 Orang			
					Rp 10.000.000	Rp 10.000.000			
				Kegiatan :					
					100%	99,82%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 419.395.000	Rp 418.658.332			
				- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Jenis Rp 7.500.000	1 Jenis Rp 7.500.000			
				- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Jenis Rp 30.400.000	2 Jenis Rp 30.177.000			
				- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Jenis Rp 21.800.000	2 Jenis Rp 21.790.000			
				- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5 Jenis Rp 5.000.000	5 Jenis Rp 5.000.000			
				- Penyediaan Bahan/Material	1.096 Buah Rp 66.853.000	1.096 Buah Rp 66.853.000			
				- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Kali Rp 287.842.000	245 Kali Rp 287.338.332			
				Kegiatan :					
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100% Rp 15.000.000	100% Rp 15.000.000			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				- Pengadaan Mebel	1 Jenis	1 Jenis			
					Rp 15.000.000	Rp 15.000.000			
				Kegiatan :					
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	96,03%			
					Rp 111.945.423	Rp 107.503.973			
				- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan			
					Rp 10.000.000	Rp 9.996.000			
				- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan			
					Rp 101.945.423	Rp 97.507.973			
				Kegiatan :					
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	99,95%			
					Rp 165.060.000	Rp 164.978.814			
				- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21 Unit	21 Unit			
					Rp 140.060.000	Rp 139.978.814			
				- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Jenis	6 Jenis			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp 25.000.000	Rp 25.000.000			
				Program Pengembangan Perumahan	100%	285,30%			
					Rp 3.058.058.000	Rp 2.756.255.061			
				<i>Kegiatan :</i>					
				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	97,92%			
					Rp 268.010.000	Rp 262.429.435			
				- Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			
					Rp 95.000.000	Rp 94.627.000			
				- Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen			
					Rp 47.500.000	Rp 47.380.000			
				- Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Laporan	1 Laporan			
					Rp 21.010.000	Rp 20.860.000			
				-	1 Laporan	1 Laporan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Rp 45.000.000	Rp 44.761.000			
				- Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 SK	1 SK			
					Rp 25.000.000	Rp 24.955.000			
				- Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	1 Laporan	1 Laporan	Sudah Pernah Terdata Tahun Sebelumnya	Pembenahan Database	
					Rp 34.500.000	Rp 29.846.435			
				Kegiatan :					
				Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	100%	98,45%			
					Rp 131.421.500	Rp 129.382.726			
				- Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Rp 0	Rp 0	Refocusing Anggaran		
				- Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim	1 SK	1 SK			
					Rp 50.010.000	Rp 49.202.000			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Pendamping dan Fasilitator					
				- Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana	1 SK Rp 38.442.500	1 SK Rp 37.807.500			
				- Koordinasi Untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	1 Dokumen Rp 42.969.000	1 Dokumen Rp 42.373.226			
				Kegiatan :					
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp 2.658.626.500	Rp 2.364.442.900			
				- Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	96 Unit Rp 2.658.626.500	83 Unit Rp 2.364.442.900	Gaji Koordinator Lapangan, 13 Unit		
				- Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Rp 0	Rp 0	Refocusing Anggaran		
				Kegiatan :					
				Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan atau Rumah Khusus	100% Rp 0	0% Rp 0			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				- Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rp 0	Rp 0	Refocusing Anggaran		
				Kegiatan :					
				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100%	0%			
					Rp 0	Rp 0			
				- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Rp 0	Rp 0	Refocusing Anggaran		
				- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Rp 0	Rp 0	Refocusing Anggaran		
				Kegiatan :					
				Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	0%	0%			
					Rp 0	Rp 0			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				- Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Rp 0	Rp 0	Refocusing Anggaran		
				Program Kawasan Permukiman	100%	82,04%			
					Rp 359.544.000	Rp 188.441.200			
				<i>Kegiatan :</i>					
				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	100%	35,05%			
					Rp 175.932.000	Rp 58.145.800			
				- Penyusunan dan/atau Review Serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen	Bentuk Pelaksanaan Kegiatan yang Kurang Diminati	Perubahan Proses Pelaksanaan Kegiatan	
					Rp 120.669.000	Rp 9.963.400			
				- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen	Biaya Penginapan yang Tidak Terealisasi	Penggunaan Biaya Penginapan	
					Rp 55.263.000	Rp 48.182.400			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan :					
				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	100%	67,79%			
					Rp 121.061.000	Rp 82.066.400			
				- Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh	Rp 0	Rp 0	Refocusing Anggaran		
				- Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	2 Kecamatan Rp 17.991.000	2 Kecamatan Rp 17.991.000	Tersisa untuk Belanja Akte Notaris	Akan Direalisasikan	
				- Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	2 Kecamatan Rp 30.000.000	2 Kecamatan Rp 28.810.000	Makan dan Minum yang Tidak Terealisasi	Sisa Dana Akan Dikembalikan	
				- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	3 Laporan Rp 35.270.000	3 Laporan Rp 28.171.200	Masih Dalam Pelaksanaan	Sisa Dana Akan Dikembalikan	
				-	1 Laporan	1 Laporan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Rp 2.800.000	Rp 0	Belum ada Dasar atau Regulasi	Pembuatan Regulasi	
				- Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	1 Laporan Rp 35.000.000	1 Laporan Rp 7.094.200	Jumlah Dana yang Kurang	Penambahan Anggaran	
				Kegiatan :					
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	100% Rp 62.551.000	77,10% Rp 48.229.000			
				- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Rp 0	Rp 0	Refocusing Anggaran		
				- Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1 Laporan Rp 3.755.000	1 Laporan Rp 3.755.000	Tidak ada Perbaikan RTLH	Kerja Sama Perbaikan RTLH	
				- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian	1 Laporan	1 Laporan	Masih Dalam Tahap Pelaksanaan	Sisa Dana Akan Dikembalikan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Rp 41.456.000	Rp 29.124.000			
				- Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Rp 0	Rp 0	Refocusing Anggaran		
				- Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	1 Laporan	1 Laporan	Pelaksanaan dan Waktu yang Kurang Sesuai	Pengaturan Waktu dan Pelaksanaan Pada Saat Pelaksanaan	
					Rp 17.340.000	Rp 15.350.000			
				Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	100%	98,97%			
					Rp 2.213.871.000	Rp 2.142.851.920			
				<i>Kegiatan :</i>					
				Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	100%	96,79%			
					Rp 2.213.871.000	Rp 2.142.851.920			
				-	50 Unit	49 Unit			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha	Rp 2.213.871.000	Rp 2.142.851.920	Satu Orang Penerima Bantuan Mengundurkan Diri, Terhambatnya Proses Fisik Dilapangan karena Terlambatnya Penyaluran Bahan Material	Diluncurkan Tahun Depan Setelah Penetapan SK Bupati, Koordinasi dengan Pihak Toko	
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100%	92,13%			
					Rp 4.574.349.370	Rp 4.208.742.940			
				<i>Kegiatan :</i>					
				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	100%	263,13%			
					Rp 4.574.349.370	Rp 4.208.742.940			
				- Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen	Alokasi Penambahan Anggaran		
					Rp 209.320.000	Rp 204.731.140			
				- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	146 Paket	146 Paket	Kontrak Pekerjaan Dimulai pada Bulan Juni	Percepatan Pelaksanaan Kontrak	
					Rp 4.337.481.370	Rp 3.983.769.800			
				-	15 Kali	15 Kali			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Rp 27.548.000	Rp 20.242.000	Perjalanan Dinas Pendampingan, Pemeriksaan Inspektorat dan Arsinum pada Akhir Tahun	Pemeriksaan Inspektorat dan Pelaksanaan Kegiatan sebaiknya Dilakukan pada Awal Tahun	
				Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	55,52%			
					Rp 10.326.600	Rp 5.733.800			
				Kegiatan :	100%	55,52%			
				Sertifikasi dan Registrasi Bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah Serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Rp 10.326.600	Rp 5.733.800			
				- Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan	5 Kali	5 Kali	Tidak Adanya Pengembang	Adanya Pengembang	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Rp 10.326.600	Rp 5.733.800	Perumahan di Kabupaten Kepulauan Selayar	Perumahan di Kabupaten Kepulauan Selayar	
TOTAL					Rp 13.280.667.393	Rp 12.330.318.549			

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 melaksanakan program dan kegiatan yang mengacu pada RKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2022. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan 6 Program dan 20 Kegiatan dengan 60 sub kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

2.1.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
1.	Persentase penurunan luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha (%)	%	2,11	6,32%	6,32%	
2.	Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	%	3,72	3,26%	3,26%	
3.	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	%	0,58	0,50%	0,50%	
4.	Persentase rekomendasi pengusulan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi pengembang yang diterbitkan (%)	%	100	-	-	Tidak adanya pengembang yang memenuhi kriteria untuk penerbitan sertifikat sebagai acuan permintaan bantuan PSU Perumahan
5.	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	%	100	82,14%	82,14%	

2.1.3. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN URUSAN

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 tidak mengelola program dan kegiatan berdasarkan urusan.

2.1.4. ANALISIS KESESUAIAN ANTARA KEGIATAN DENGAN TARGET KINERJA PROGRAM YANG SUDAH DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN KINERJA

No.	Urusan Pemerintahan Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)
1	2	3	4	5=4-3	$6=(4/3)*100$	7	8	9	10
1	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.13.280.667.393	Rp. 12.330.318.549	Rp. 950.348.844	92,84	6	100	20	94,44

2.1.5. INOVASI

NO.	URAIAN INOVASI	MAKSUD DAN TUJUAN INOVASI	HASIL/ MANFAAT	KET.
1	2	3	4	5
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

2.1.6. PRESTASI/ PENGHARGAAN

No.	Nama Penghargaan	Tingkat				Diselenggarakan oleh/ Penyelenggara	Ket.
		Internasional	Nasional	Provinsi	Kabupaten		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Piagam/Penghargaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan Penghargaan Kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Atas Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas Diberikan pada Rapat Gelar				√	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar	

No.	Nama Penghargaan	Tingkat				Diselenggarakan oleh/ Penyelenggara	Ket.
		Internasional	Nasional	Provinsi	Kabupaten		
	Pengawasan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022						

2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN TAHUN 2022

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Ket.
		Nomor/Tanggal Pengesahan	Tentang		
1	2	3	4	5	6
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
6.	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	%	100	-	-	Tidak ada Data Rumah yang Terdampak relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS
PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

1.1. Tugas Pembantuan dan Penugasan Yang Dilaksanakan (NIHIL)

1.2. Hambatan-Hambatan (NIHIL)

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak mengelola tugas pembantuan.

BAB IV PENUTUP

Secara umum, Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya pada bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat diselenggarakan dengan optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi tersebut juga sangat ditopang oleh kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

Capaian kinerja tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dijelaskan dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ini, sesungguhnya merupakan kinerja segenap komponen yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar, yang telah melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka mendukung Selayar sebagai Kabupaten Kepulauan Maritim yang sejahtera berbasis nilai keagamaan dan budaya.

Meskipun Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat diselenggarakan secara optimal berdasarkan indikasi pencapaian sasaran program dan kegiatan oleh segenap Instansi/Unit Kerja yang ada dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, namun disadari bahwa masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi keterbatasan, permasalahan dan hambatan yang melingkupi.

Dengan mengacu pada kondisi permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022, maka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun-tahun berikutnya akan terus dilakukan penyempurnaan dan perbaikan, khususnya dalam memenuhi harapan masyarakat.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 ini disusun sebagai suatu kewajiban konstitusional dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sekian dan Terima Kasih

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Benteng, Januari 2023

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR,**

DR. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si.

Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19840104 200903 2 003